

## **EFEKTIVITAS PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI (PBAK) DI POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

Prasetya Putra Nugraha<sup>1\*</sup>, David Bani Adam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi D3 T. Komputer, Politeknik Harapan Bersama, Tegal

\*Email: [nugrahaputraprasetya@gmail.com](mailto:nugrahaputraprasetya@gmail.com)

***Abstract.** Politeknik Harapan Bersama is one of the Private Universities in LLDIKTI Region VI which implements Anti-Corruption Cultural Education as an effort to fight against corrupt behaviour. In its imementation not all study programs implement specific anti corruption education, but some are inserted into other courses. This research aims to analyse how effective learning is anti-corruption education learning in Politeknik Harapan Bersama and learning achievements in efforts to combat corruption. Methods used in this study is observation to observe the anti-corruption education learning process and in-depth interviews to gain perpective related to anti corruption education learning on campus. This research states that implementation of anti-corruption education in universities is very important to instill integrity and character values in students, and synergy between intitutions is needed in order to achieve effective and efficient results.*

***Keywords:** Politeknik Harapan Bersama, anti-corruption education, anti-corruption.*

### **PENDAHULUAN**

Pada era saat ini, tantangan globalisasi sangat berpengaruh sekali pada etika maupun moralitas serta keterlibatan politik pada suatu bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting sekali dalam membentuk karakter masyarakat suatu bangsa, karena dengan keberadaannya setiap peserta didik akan mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pusat Data dan Informasi Pendidikan 2003). Pendidikan juga sangat menentukan arah masa depan seseorang sekaligus juga menjadi tolak ukur kualitas seseorang, oleh karenanya dengan keberadaannya diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya degradasi moral yang menjadi ancaman dan hambatan bagi keutuhan bangsa. Degradasi moral penurunan atau kemerosotan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani

yang ditandai dengan berbagai bentuk kenakalan dan pelanggaran nilai-nilai etika dan sosial (Thomas Lickona, 1992). Degradasi moral ini ditandai dengan berbagai perilaku-perilaku menyimpang yang menyebabkan kerugian dalam masyarakat. Namun demikian arah pendidikan pada saat ini sudah mulai bergeser, dimana tujuan pendidikan yang semula lebih pada untuk memanusiaikan manusia dengan menekankan pada nilai-nilai intelektual dan moral kini lebih mulai berorientasi pada sisi materialistis, ekonomi, maupun teknokrat, sehingga unsur-unsur kognitif dalam pembelajaran lebih diutamakan daripada sisi pedagogik maupun afektif. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual daripada kecerdasan hati, sehingga tidak jarang output dari pendidikan kurang memerhatikan aspek-aspek moral sehingga tidak luput dari penyimpangan-penyimpangan berupa degradasi moral.

Salah satu bentuk degradasi moral adalah perilaku korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang

berhubungan dengan penyelewengan, penyuapan, manipulasi, dan tindakan lainnya yang melawan hukum, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum (Candra 2023). Perilaku korup dapat berasal dari dorongan keluarga, karena lingkungan keluarga sangat memotivasi orang untuk melakukan korupsi dan mengatasi akhlak baik seseorang yang telah menjadi ciri pribadi (Suhandi and Agustin 2023). Korupsi telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, salah satunya adalah perguruan tinggi dimana perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, etika, dan moral namun di dalamnya banyak terjadi praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, penerimaan mahasiswa, dan penyelewengan dana penelitian, sehingga tentu hal ini akan berdampak selain pada moralitas mahasiswa juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perguruan tinggi (Anisa Farras Azmii et al. 2024). Oleh karenanya korupsi menjadi musuh bersama bagi kita semua, oleh karena itu diperlukan suatu upaya dalam menanggulangnya, salah satunya adalah melalui Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi menjadi bagian dari upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan, maupun gambaran mengenai bahaya akan tindak korupsi serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang 2019). Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi juga diharapkan tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, melainkan lebih daripada itu yaitu dengan membentuk karakter peserta didik dalam mewujudkan budaya antikorupsi (Pemerintah Republik Indonesia 2002).

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi diselenggarakan pada program diploma dan sarjana (Permenristekdikti 2019).

Politeknik Harapan Bersama

merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah LLDIKTI VI yang menerapkan Pendidikan Antikorupsi sebagai ikhtiar dalam melawan perilaku korupsi.

Pada penelitian kali ini efektivitas pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dipilih sebagai objek kajian. Dalam pelaksanaannya tidak semua Program Studi memberlakukan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi secara khusus, namun ada beberapa yang disisipkan pada mata kuliah lain seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, maupun Pendidikan Agama. Selain melalui perkuliahan di kelas, pelaksanaan pendidikan antikorupsi juga dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi secara khusus maupun melalui event kegiatan. Sehingga dari permasalahan ini kita akan menelaah seberapa efektifkah pelaksanaan PBAK di lingkungan Politeknik Harapan Bersama.

Ada beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian tentang pendidikan antikorupsi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zulqarnain, dkk (2022) menyatakan bahwa ada relevansi antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Antikorupsi karena dalam kehidupan bernegara ini sangat membutuhkan pedoman yang jelas dalam menentukan jatidiri kita sebagai bangsa (Zulqarnain, Ikhlas, and Ilhami 2022). Penelitian menurut Yunof Candra (2023) Perguruan tinggi perlu menjadikan pendidikan antikorupsi melalui organisasi mahasiswa serta menanamkan nilai-nilai integritas melalui syarat sistematis di seluruh aspek kehidupan kampus dan perguruan tinggi. (Candra 2023). Penelitian oleh Faadilah Shandi dan Sulistia Agustin (2023) dalam penelitiannya menyatakan keberadaan lembaga antikorupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintah suatu negara. Selain itu peran mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai pembentuk anti korupsi memang ada dan jelas bisa direalisasikan apabila dibantu pihak terkait dalam merealisasikan hal

tersebut, seperti pendidikan anti korupsi yang dapat dilaksanakan di semua jalur formal, non formal, atau informal (Suhandi and Agustin 2023).

Penelitian tentang efektivitas Pendidikan Budaya Antikorupsi di Politeknik Harapan Bersama, menawarkan solusi penting terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, sekaligus juga dalam rangka penyusunan perangkat kurikulum sehingga turut mendukung visi misi institusi pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembelajaran Pendidikan Budaya Antikorupsi di Politeknik Harapan Bersama. Peneliti akan fokus menganalisis efektivitas pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran efektif dalam rangka upaya melawan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam satu kegiatan penelitian.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi dan wawancara. Langkah yang pertama dilakukan adalah observasi di semua program studi di Politeknik Harapan Bersama dengan mengamati proses pembelajaran PBAK di berbagai prodi, termasuk metode-metode pembelajaran yang digunakan maupun beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan antikorupsi. Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan mewawancarai beberapa subjek penelitian yaitu beberapa perwakilan mahasiswa di Program studi untuk mendapatkan

perspektif terkait dengan pembelajaran PBAK di kampus. Setelah melakukan observasi dan wawancara, kemudian peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara objektif yang selanjutnya melakukan analisis secara jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Komplek et al. 2024). Perguruan Tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peran untuk mengembangkan keterampilan dan pembentukan karakter. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil observasi, tidak semua Program studi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi secara tersendiri, melainkan lebih banyak melalui sisipan pada mata kuliah lain seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan maupun Pendidikan Agama, namun ada juga yang menyelenggarakannya dalam bentuk kegiatan lain. Langkah berikutnya adalah pembagian angket kuesioner pada mahasiswa. Dari angket kuesioner yang diberikan terdapat 127 responden yang terdiri dari 11 Program studi dengan 80,3% yaitu pada mahasiswa semester 2, sebanyak 18,9% berasal dari mahasiswa semester 4, dan 0,8% yaitu mahasiswa

semester 6. Berdasarkan hasil kuesioner dari total keseluruhan sebanyak 69,3% mereka mendapatkan Pendidikan Antikorupsi melalui sisipan mata kuliah lain, 26% melalui pelaksanaan mata kuliah tersendiri, dan 4,7% dalam bentuk kegiatan lain seperti seminar, diskusi, dan sebagainya.

### Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil survei pada responden seperti yang tertuang pada gambar 1 sebanyak 77,2% menyatakan bahwa pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi sangat penting sekali, 21,3% menyatakan penting, dan ada juga yang menganggap bahwa pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi biasa saja bahkan tidak penting masing-masing ada 0,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pendidikan Antikorupsi sangatlah diperlukan di Perguruan Tinggi. Pendidikan Antikorupsi juga dianggap sangat berpengaruh pada pembentukan karakter mahasiswa dimana hasil survei menunjukkan 69,3% responden menyatakan keberadaan Pendidikan Antikorupsi sangat penting sekali dalam pembentukan karakter mahasiswa, 27,6% menyatakan penting, sedangkan 2,4% menyatakan biasa saja, dan 0,8% menganggap tidak penting. Agar lebih jelas bisa dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1. Seberapa penting penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi



Gambar 2. Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa

Sementara keberadaan Pendidikan Antikorupsi di masa sekarang ini dianggap sangat penting sekali bagi dunia pendidikan karena maju mundurnya suatu bangsa juga ditentukan oleh kondisi pendidikan, sedangkan korupsi menjadi ancaman nyata dan menjadi musuh bersama di negeri ini. Berdasarkan survei yang ditujukan melalui gambar 3 ada sebanyak 68,5% menyatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi berperan sangat penting sekali bagi dunia pendidikan, sedangkan 27,6% menyatakan penting, dan 3,1% menganggap biasa saja, 0,8% tidak penting. Oleh karenanya melihat kenyataan demikian, maka sudah sepatutnya ada integrasi antara upaya pemberantasan korupsi dengan dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam pemberantasan korupsi, dimana ada tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi pada mahasiswa melalui kurikulum dalam pendidikan, sehingga terdapat beberapa survei mengenai seberapa pentingkah keberadaan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di perguruan tinggi. Pada gambar 4 menunjukkan Sebanyak 52,8% responden menyatakan bahwa penyelenggaraan mata kuliah PBAK penting sekali, 40,2% menyatakan penting, 3,9% biasa saja, dan 3,1% menyatakan bahwa penyelenggaraan PBAK tidak penting. Selain itu Pendidikan Antikorupsi dianggap sangat fundamental dalam

penanaman karakter pada mahasiswa di era sekarang ini, artinya sejak awal masuk kuliah harus sudah dibekali komitmen untuk memerangi korupsi. Salah satu momen yang sangat efektif dalam upaya tersebut adalah melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Berdasarkan keterangan gambar 5 sebanyak 48% menyatakan bahwa sangat penting sekali mahasiswa baru perlu diberikan bekal pendidikan antikorupsi pada event PKKMB, 43,3% menyatakan penting, 6,3% biasa saja, dan ada 2,4% menyatakan tidak penting. Untuk menunjang dalam upaya pemberantasan korupsi juga diperlukan adanya unit khusus sebagai bagian penanggung jawab. Berkaitan dengan hal ini sebanyak 29,1% menyatakan penting sekali apabila di intitusi perguruan tinggi dibentuk unit khusus dalam menunjang upaya pemberantasan korupsi, 55,9% menyatakan penting, 11,8% biasa, dan 3,1% tidak penting. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam gambar grafik berikut:



Gambar 3. Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Dunia Pendidikan

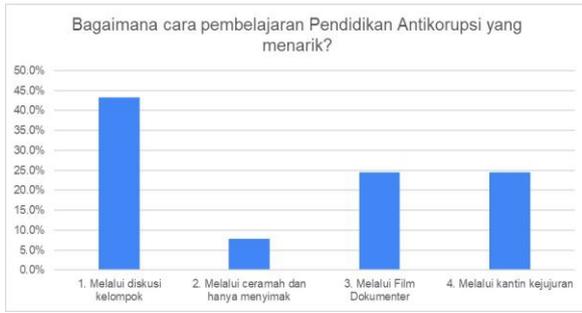


Gambar 4. Seberapa penting penyelenggaraan Mata Kuliah PBAK di Perguruan Tinggi



Gambar 5. Seberapa penting Penyuluhan Antikorupsi pada event PKKMB

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sangat diperlukan di dunia pendidikan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Namun demikian bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang efektif itu juga sangat menentukan. Pelaksanaan PBAK diberikan kepada mahasiswa tidak hanya diberikan secara teori saja, namun lebih pada metode yang lebih menarik. Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 6 ada sebanyak 43,3% memilih pelaksanaan PBAK melalui diskusi kelompok, selain itu metode yang lain yaitu melalui kantin kejujuran dan film dokumenter masing-masing sebanyak 24,4%, dan sebanyak 7,9% lebih suka melalui ceramah atau menyimak. Selain itu dari pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang sudah dilaksanakan selama ini juga memberikan dampak bagi mahasiswa. Dari seluruh responden yang tersaji pada gambar 7 sebanyak 57,5% mereka menjadi lebih kritis pada kondisi yang ada di negeri ini, 34,6% lebih berhati-hati dalam bertindak, dan 3,1% lebih pada menunjang studi, sedangkan 4,7% menyatakan tidak ada benefit yang didapat. Agar lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar grafik yang tersaji di bawah ini:



Gambar 6. Cara Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi



Gambar 7. Keuntungan setelah mendapatkan Pendidikan Antikorupsi

**Sinergitas Antar Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi**

Untuk mensukseskan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dibutuhkan sinergi antar kelembagaan. Adanya sinergitas antar kelembagaan ditujukan agar mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama yaitu dalam memberantas praktik-praktik korupsi. Sinergitas tersebut dapat dilakukan adanya kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan stakeholder maupun lembaga atau organisasi kemahasiswaan, serta adanya komitmen bersama dalam memerangi korupsi. Pada gambar 8 menunjukkan hasil survey responden ada sebanyak 33,1% menyatakan penting sekali apabila institusi perguruan tinggi melakukan Mou dengan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan lainnya 57,5% menyatakan penting, dan 8,7 biasa saja, 0,1% menyatakan tidak penting. Bentuk

sinergitas lain antara lain adalah kerjasama dengan organisasi mahasiswa (Ormawa) sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Pada gambar 9 menunjukkan sebanyak 24,4% menyatakan penting sekali, 55,1% menyatakan penting, 18,1% biasa saja, dan sebanyak 2,4% menyatakan tidak penting. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi diperlukan sebuah pakta integritas pada civitas akademika, sehingga ada konsekuensi yang diterima apabila melanggar daripada pakta tersebut. Pada gambar 10 memperlihatkan hasil survei sebanyak 35,4% menyatakan penting sekali apabila ada sebuah pakta integritas untuk civitas akademika dan 52,8% lebih menyatakan penting, namun ada 11% menganggap itu biasa saja dan 0,8% tidak penting. Hasil uraian tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:



Gambar 8. Perlunya Mou antara institusi kampus dengan KPK



Gambar 9. Keterlibatan Organisasi Kemahasiswaan dalam Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi



Gambar 10. Pakta Integritas antara civitas akademika terhadap penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi sangatlah penting sekali karena merupakan bagian daripada penanaman nilai-nilai karakter dan integritas pada mahasiswa. Oleh karena itu dalam implementasinya diperlukan adanya manifestasi berupa mata kuliah PBAK yang bersifat wajib. Disamping itu juga diperlukan sebuah metode pembelajaran yang efektif yang tidak hanya menekankan pada sisi kognitif saja, namun lebih bari itu yaitu melalui diskusi-diskusi berupa studi kasus atau kegiatan di lapangan yang lebih implementatif.

Untuk mensukseskan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi diperlukan adanya sinergitas antar lembaga agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Bentuk sinergitas tersebut antara lain adalah adanya kerjasama dengan lembaga negara KPK maupun ORMAWA sebagai wadah aspirasi mahasiswa, serta diperlukan pakta integritas pada civitas agar berkomitmen pada upaya dalam memberantas korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- B.-D. Pusat Data dan Informasi Pendidikan, "UU Nomor 20 Tahun 2003," *Zitteliana*, vol. 19, no. 8, pp. 159–170, 2003.
- B. Y. Candra, "Kepemimpinan dan Kontrol

Kebijakan: Pembentukan Budaya Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Bach.," vol. 5, pp. 123–134, 2023.

- M. F. Suhandi and S. Agustin, "Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi," *Nas Media Pustaka Makassar*, 6(11), 951–952., vol. 01, no. Mi, pp. 5–24, 2023.

Anisa Farras Azmii, Agnes Tika, Denaya Syabilla Fitri, and Monika Septiyar, "Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 3, pp. 155–162, 2024, doi: 10.62383/aliansi.v1i3.184.

- U.-U. N. 19 tahun 2019 T. P. Undang-Undang, "No Title Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," no. 012591, pp. 1–46, 2019, [Online]. Available: <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250*, pp. 1–40, 2002.

- A. Komplek, G. Gemilang, J. Trip, J. No, and K. Serang, "Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Muhamad Yusar positif terhadap integritas , kesadaran etika , dan sikap anti korupsi mahasiswa . Hal ini hanya penerima pengetahuan , tetapi juga agen perubahan yang potensial dalam masyarakat .," no. 4, 2024.

Permenristekdikti, "No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi," 2019.

- Z. Zulqarnain, M. Ikhlas, and R. Ilhami, "Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance," *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 8, no. 1, pp. 123–134, 2022, doi: 10.32697/integritas.v8i1.854.